



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jln. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687. Fax. (0756) 22725

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 570.1/ /Kpts/DPMPTSP-PS/I/2018

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENUNJUKAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tentang penunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, maka perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah .
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tanggal 2 Desember 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ 28 /Kpts/BPT-PS/2018 tanggal, 4 Januari 2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Penerima dan Pengeluaran pada masing-masing satuan kerja perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Tahun 2018, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini :
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut adalah :
- 1. Menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan.
 - 2. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 - 3. Membuat Bukti Pembayaran dan Bukti Pengeluaran Kas (BPK).
 - 4. Menyerahkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan pada Bupati.
 - 5. Menyiapkan SPJ atas Pengeluaran Kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD.
 - 6. Menyusun Laporan Kegiatan Fisik dan Keuangan untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 7. Membuat Kontrak Kegiatan untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran Tahun 2018, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : Januari 2018

KEPALA DINAS

Drs. SUARDI, S. M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19610324 198603 1 004

- Tembusan : disampaikan kepada Yth.
- 1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
 - 2. Bapak Kepala Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
 - 3. Bapak Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
 - 4. Sdr. Kabag. Adm. Pembangunan Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan
 - 5. Yang bersangkutan.
 - 6. Arsip

Lampiran : lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 Nomor : 570.1/ /Kpts/DPM2TSP-PS/I/2018
 Tanggal : Januari 2018
 Tentang : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pelayanan Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

NO	NAMA/NIP PANGKAT /GOL	JABATAN	JABATAN KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	KEGIATAN SEKRETARIAT YANTI YOSEFA, SE NIP. 19800108 200701 2 002 / Penata (III/c)	Staf	PPTK	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan jasa Kebersihan kantor 2. Penyediaan alat tulis kantor 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Penyediaan makanan dan minuman 5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 7. Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	PA
2	KEGIATAN SEKRETARIAT YULIANDA SUNDARI, S.Sos NIP. 19800703 200701 2 003 (Penata (III/c)	Kasubag Umum & Kepegawaian	PPTK	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN & PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4. Penyediaan Komponen instalasi/Penerangan bangunan kantor 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan 6. Pengadaan kendaraan Dinas/ Operasional 6. Pendidikan dan Pelatihan Formal PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KPA KPA
5	BUSTAMI / 19641210 198602 1 001 Penata (III/c)	Kasi Fasilitasi Penanaman Modal	PPTK	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI - Pelayanan Penanaman Modal	KPA
6	ERMA, SH. MM NIP. 19720202 199203 2 009	Kasi Advokasi	PPTK	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	KPA

	Pembina (IV/a)			- Koordinasi bidang penanaman modal	
--	----------------	--	--	-------------------------------------	--

NO	NAMA/NIP PANGKAT /GOL	JABATAN	JABATAN KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6
				PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN - Penyusunan Regulasi Penanaman Modal	KPA
7	LIA JENNI HARPITA, SE.M.Si NIP.19850119 201101 2 025 Penata (III/c)	Kasi Pengendalian Penanaman Modal	PPTK	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI - Pengawasan dan Pengendalian penanaman Modal	KPA
8	NINA HARNENGSIH, SH NIP. 19770610 200003 2 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasi Pelaporan Perizinan	PPTK	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN - Survey Indek Kepuasan Masyarakat	KPA
9	SUHAILIS, SH NIP. 19621109 198301 1 001 Penata TK. I (III/d)	Kasi Perizinan dan Non Perizinan	PPTK	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN - Operasional Penyelenggara Perizinan	KPA
10	DENY SURYATI, SSTP, M.Sc NIP.19771207 199612 2 001 Pembina (IV/a)	Kasi Pengawasan dan Pengaduan	PPTK	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN - Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan	KPA
12	JUNERWIN, SH NIP. 19670915 198903 1 016 Pembina (IV/a)	Kasi Data dan Informasi	PPTK	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI - Pendataan Realisasi Investasi Non Fasilitas dan Rumah Tangga - Pengembangan sistem informasi perizinan dan penanaman modal	KPA
13	JON BRAMULIA,SE NIP. 19610328 198611 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Kasi Kerjasama Investasi	PPTK	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI - Pelayanan kerjasama investasi	KPA
14	YUSMARDI ,SE NIP. 19781129 201101 1 005 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasi Promosi	PPTK	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI - Promosi Investasi dalam Negeri	KPA

Painan, Januari 2018
KEPALA DINAS

Drs. S U A R D I, S.M.Si

NIP : 19610324 198603 1 004

Lampiran : Perubahan atas lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Nomor : 570.1/ /Kpts/DPM2TSP-PS/IX/2017
Tanggal : 02 Oktober 2017
Tentang : Perubahan atas lampiran Keputusan Kepala Dinas tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi PPTK pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

NO	NAMA/NIP PANGKAT /GOL	JABATAN	JABATAN KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	KEGIATAN SEKRETARIAT YANTI YOSEFA, SE NIP. 19800108 200701 2 002 / Penata (III/c)	Staf	PPTK	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan jasa Kebersihan kantor 2. Penyediaan alat tulis kantor 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Penyediaan makanan dan minuman 5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 7. Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional 8. Penyedian Jasa peralatan dan perlengkapan kantor PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN & PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan 3. Penyedian jasa perbaikan peralatan kerja 4. Penyediaan Komponen instalasi/Penerangan bangunan kantor 5. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan 6. Penyedian Jasa Tenaga Kerja Non PNS 7. Pendidikan dan Pelatihan Formal	PA
2	KEGIATAN SEKRETARIAT YULIANDA SUNDARI, S.Sos NIP. 19800703 200701 2 003 (Penata (III/c)	Kasubag Umum & Kepegawaian	PPTK		KPA
3	KEGIATAN SEKRETARIAT ZULKASMI, SH / STAF NIP. 19641010 199203 1 008 / Penata (III/c)	Staf	PPTK	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	PA
5	KEGIATAN BIDANG PENANAMAN MODAL DAN PENGENDALIAN BUSTAMI / 19641210 198602 1 001 Penata (III/c)	Kasi Fasilitasi Penanaman Modal	PPTK	- Pelayanan Penanaman Modal - Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	KPA KPA

NO	NAMA/NIP PANGKAT /GOL	JABATAN	JABATAN KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KET
6	ERMA, SH. MM NIP. 19720202 199203 2 009 Pembina (IV/a)	Kasi Advokasi	PPTK	- Koordinasi bidang penanaman modal - Penyusunan Naskah Akademis Ranperda tentang Penanaman Modal	KPA
7	LIA JENNI HARPITA, SE.M.Si NIP.19850119 201101 2 025 Penata (III/c)	Kasi Pengendalian Penanaman Modal	PPTK	- Lokakarya Penyusunan LKPM	KPA
KEGIATAN BIDANG PELAYANAN					
8	NINA HARNENGSIH, SH NIP. 19770610 200003 2 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasi Pelaporan Perizinan	PPTK	- Survey Indek Kepuasan Masyarakat	KPA
9	SUHAILIS, SH NIP. 19621109 198301 1 001 Penata TK. I (III/d)	Kasi Perizinan dan Non Perizinan	PPTK	- Operasional Penyelenggara Perizinan	KPA
10	ASNIL, S.Sos NIP. 19780920 200501 1 005 Penata TK. I (III/d)	Kasi Pengawasan dan Pengaduan	PPTK	- Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan	KPA
KEGIATAN BIDANG PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI					
11	TAVIP INDRAWATI.S.Sos NIP. 19641015 198808 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Kasi Promosi	PPTK	- Promosi Investasi dalam Negeri	KPA
12	JUNERWIN, SH NIP. 19670915 198903 1 016 Pembina (IV/a)	Kasi Data dan Informasi	PPTK	- Pendataan Realisasi Investasi Non Fasilitas dan Rumah Tangga - Pengembangan sistem informasi perizinan dan penanaman modal	KPA KPA
13	JON BRAMULIA,SE NIP. 19610328 198611 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Kasi Kerjasama Investasi	PPTK	- Pelayanan kerjasama investasi	KPA

Painan, 02 Oktober 2017
KEPALA DINAS

Drs. S U A R D I, S.M.Si
NIP : 19610324 198603 1 004